

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Pada Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)

Dhini Setya Werdhani

**Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

dhinisetyawerdhani@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini Pemerintah mempunyai strategi agar Desa menjadi mandiri dan otonom. Strategi tersebut berupa Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan meneliti Peran Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Peran Kepemimpinan Kepala Desa yang efektif sangat dibutuhkan papalagi tentang pengelolaan Dana Desa. Dari pengamatan Peneliti peran Kepemimpinan Kepala Desa Puri dalam pengelolaan Dana Desa sudah baik, terlihat dari penggunaan Dana Desa yang sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Bisa dikatakan peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa sudah efektif. Keefektifan tersebut bisa terlihat dari terealisasinya pembuatan gorong-gorong dan irigasi Desa. Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Desa. Hanya saja yang masih menjadi kendala dalam pelaporan tentang pengelolaan Dana Desa yang melalui internet adalah Sumber Daya Manusia yang belum menguasai tentang teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini.

Kata Kunci: Peran Kepemimpinan Kepala Desa, Efektifitas Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Saat ini Pemerintah sedang mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat berhak menggunakan hak dan kewajibannya untuk dilayani. Dalam hal ini yang bertanggung jawab melayani masyarakat adalah instansi pemerintahan. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah pemerintah daerah yang dimaksud dalam tulisan ini lebih menekankan pada Pemerintah Desa.

Pada saat ini perkembangan pemerintah Desa susah semakin pesat. Hal itu ditandai dengan adanya Otonomi Desa. Dengan adanya Otonomi Desa, pemerintah Desa berhak mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang NO. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebagai perwujudan dari adanya otonomi desa maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Dana Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 72 mengatakan “Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, bagi hasil pajak daerah Kabupaten bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Disini penulis juga akan membahas tentang Dana Desa. Pengertian Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang Dana

Desa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.” Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditentukan 10 persen dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan umlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa diberikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pembangunan Desa. Dana Desa di harapkan bisa mendorong pembiayaan program-program pemerintah desa, untuk bisa memberikan pelayanan, serta pemberdayaan kepada masyarakat Desa. Untuk Dana Desa yang wajib bertanggung jawab dalam pengelolaannya adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa dikatakan sudah efektif bisa dilihat dari pengelolaan yang sudah tepat sasaran. Untuk mengetahui seberapa besar peran Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa dan di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, maka judul yang tepat sesuai dengan uraian diatas adalah “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa.”

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran kepemimpinan Kepala Desa terhadap efektifitas pengelolaan Dana Desa?

KAJIAN PUSTAKA

Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok menurut George R. Terry.

Efektifitas

Efektifitas sebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas (Chester I. Bernard dalam Gibson 1994:27).”

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Sebagaimana di kemukakan Moleong (2004:93-94) “dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang inquiry.

Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Desa Puri. Desa Puri merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Desa Puri mempunyai empat Dusun yaitu, Dusun Puri, Dusun Sawo, Dusun Tegalsari, dan Dusun Temon.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer yang merupakan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Desa Puri
2. Data sekunder yaitu data dari Kepala Desa Puri yang merupakan dokumen dari pengelolaan Dana Desa di Desa Puri,

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa hasil dari observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENYAJIAN DATA

Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut George R. Terry (Miftah Thoha, 2010:5) mengartikan bahwa kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Peran kepemimpinan Kepala Desa Puri terhadap pengelolaan Dana Desa dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

- a. Fungsi Perencanaan

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Puri, untuk fungsi perencanaan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Puri sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penganggaran yang harus direncanakan sebelum tanggal 31 Desember, yang disebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Setelah RAPBDes dibuat, maka selanjutnya akan

dirapatkan dengan BPD, yang kemudian ditentukan dan menyetujui RAPBDes menjadi APBDes.

b. Fungsi Pengawasan

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Puri, dalam pengelolaan Dana Desa pasti ada pengawasan tersendiri. Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Badan Permussyawaratan Desa (BPD) dan juga Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pengawasan tersebut untuk memastikan realisasi penerimaan Dana Desa sudah sesuai dengan perhitungan sebagaimana mestinya.

c. Fungsi Mengambil Keputusan

Ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Puri, dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Puri Kepala Desa menjadi penanggung jawab mutlak. Maka dari itu untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan Dana Desa tidak boleh sembarangan. Harus sesuai prosedur.

Efektifitas

Efektifitas menurut Abdurahmat (2003:92) “efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Efektifitas pengelolaan Dana Desa di Desa Puri dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

a. Input

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Puri menunjukkan input dari pengelolaan Dana Desa di Desa Puri terdiri dari cairan dana sebesar Rp. 687.253.000. Dalam pengelolaan Dana Desa semua Perangkat Desa juga harus ikut serta. Disini ada sarana prasarana seperti server untuk menunjang pelaporan pengelolaan Dana Desa secara online. Pengelolaan harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan Desa. Biaya pengelolaan Dana Desa dibebankan pada APBDes. Maka dari itu pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan RAPBDes.

b. Proses Produksi

Ditunjukkan pada hasil wawancara dengan Kepala Desa Puri, proses produksi pengelolaan Dana Desa dimulai dari tingkat atas, yaitu dari Menteri Keuangan yang mentransfer Dana Desa melalui RKUN, kemudian dari RKUN di transfer ke RKUD. Dari RKUD di salurkan melalui rekening Desa sesuai transfer APBD. Setelah dana di transfer maka masuk pada tahap pelaksanaan penggunaan Dana Desa, pelaporan dan terakhir adalah pertanggung jawaban.

c. Hasil (output)

Sesuai dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Puri hasil atau output dari pengelolaan Dana Desa berupa pembangunan gorong-gorong, saluran selokan atau drainase, dan pembangunan atau pemeliharaan irigasi desa. Untuk selanjutnya ada dari hasil tersebut ada laporan atau pertanggung jawaban atas penggunaan Dana Desa tersebut. Namun pertanggung jawaban harus menunggu semua dana

si transfer oleh Pemerintah Pusat. Karena pencairan dana Desa di bagi menjadi tiga tahap dalam satu tahun anggaran.

d. Produktifitas

Dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Puri, produktifitas pengelolaan Dana Desa di Desa Puri terkendala oleh lemahnya sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya zaman sehingga dalam pengelolaan saat ini juga di dukung dengan berkembangnya teknologi informasi. Saat ini kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi menjadi kendala. Maka dalam mengelola Dana Desa saat ini ada yang bekerja sebagai tim teknologi informasi. Yaitu sebagai staf yang melakukan pelaporan secara online.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penyajian data diatas , diketahui bahwa peran kepemimpinan Kepala Desa Puri menunjukkan hasil yang baik dalam pengelolaan Dana Desa. Beberapa indicator yang menunjukkan hasil yang baik dari peran kepemimpinan Kepala Desa diantaranya:

a. Fungsi Perencanaan

Dalam fungsi perencanaan terhadap pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa Puri sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur. Semua rencana tentang pengelolaan Dana Desa sudah dituangkan langsung pada RAPBDes yang sejuan lanjutnya dirapatkan dengan BPD dan PTPKD. Setelah mendapat persetujuan dari semua pihak

maka RAPBDes yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan menjadi APBDes.

b. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Puri dilakukan oleh BPD dan juga PTPKD. Dengan adanya pengawasan dari BPD dan PTPKD, maka dapat diketahui apa saja yang sudah terealisasi dalam penggunaan Dana Desa yang sudah diterima. Terlihat sesuai atau tidak dengan apa yang sudah direncanakan dalam penggunaan Dana Desa.

c. Fungsi Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam pengelolaan Dana Desa tidak boleh sambarangan. Kepala Desa sebagai penganggung jawab penuh harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan. Karena ini menyangkut Dana Desa. Dana yang diberikan untuk pembangunan Desa. Dalam mengambil keputusan Kepala Desa Puri sudah sesuai prosedur. Oleh sebab itu dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Puri terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti.

Selain peran kepemimpinan Kepala Desa yang dibutuhkan dalam pengelolaan Dana Desa adalah efektifitas dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan penyajian data diatas, diketahui bahwa aktifitas pengelolaan Dana Desa di Desa Puri menunjukkan hasil yang baik. Beberapa indicator yang menunjukkan hasil yang efektif dalam pengelolaan Dana Desa adalah:

a. Input

Input dari pengelolaan Dana Desa di Desa Puri terdiri dari perolehan dana sebesar Rp. 687.253.000. Dalam pengelolaan Dana Desa harus memberikan hasil dari apa yang sudah direncanakan. Agar pengelolaan Dana Desa menjadi efektif dan tidak ada tidak ada ketimpangan. Harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Adanya server untuk pelaporan pengelolaan Dana Desa pada satu tahun anggaran. Sehingga bisa diketahui bisa diketahui kegiatan yang dilakukan menggunakan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa harus berguna bagi pembangunan Desa dan bisa memberikan peningkatan pendapatan Desa. Selama ini pengelolaan Dana Desa di Desa Puri terbilang sesuai dengan yang direncanakan. Karena dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui kerja sama antara Kepala Desa dan semua perangkat Desa.

b. Proses Produksi

Dari input yang ada di Desa Puri sebagai penunjang efektifitas pengelolaan Dana Desa maka proses prsi dalam pengelolaan Dana Desa maka proses produksi dalam pengelolaan Dana Desa terdiri dari dana di transfer oleh Menteri Keuangan melalui RKUN ke RKUD. Mekanisme selanjutnya penyaluran RKUN ke RKUD sesuai dengan mekanisme APBN untuk mentransfer ke daerah. Setelah itu bupati akan menyalurkan Dana Desa ke setiap Desa dari RKUD ke rekening kas Desa sesuai dengan APBD. Setelah Dana Desa diterima kemudian masuk pada tahap pelaksanaan, yaitu realisasi penggunaan Dana Desa. Setelah terealisasi maka masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pelaporan. Setelah tahap pelaporan adalah tahap pertanggung

jawaban, tahap ini menjadi tahap akhir pengelolaan Dana Desa selama satu tahun berjalan.

c. Hasil

Dari proses produksi kemudian ada hasil dari pengelolaan Dana Desa. Hasil pengelolaan Dana Desa. Kegiatan yang di hasilkan dalam pengelolaan Dana Desa diantaranya pembangunan gorong-gorong, pembuatan selokan, pembangunan dan pemeliharaan saran dan prasarana kesehatan, pembangunan atau pemeliharaan irigasi Desa, plengsengan sungai, membiayai bidang pemberdayaan masyarakat, mebiayai pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat, untuk pelatihan kader kesehatan masyarakat, pelatihan hak-hak anak, penyelenggaraan pelatihan kerja dan seminar, pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perkebunan.

d. Produktifitas

Produktifitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Puri dikeluhkan pada lemahnya sumber daya manusia (SDM). Pengaruh perkembangan zaman menjadi kendala bagi Kepala Desa Puri untuk pelaporan Dana Desa. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan akan teknologi informasi yang sedang berkembang. Sedangkan pada saat ini kebanyakan urusan pemerintahan sudah menggunakan internet. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut ada staf yang bekerja khusus di bidang teknologi informasi, yang bertugas membantu Kepala Desa Puri dalam laporan pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa.

SIMPULAN

Setelah melalui berbagai tahap prosedur penelitian dan berdasarkan hasil pengumpulan data maka tahap akhir adalah menari kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

5. Peran Kepala Desa terhadap efektifitas pengelolaan Dana Desa sudah bagus.
6. Perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Puri telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel.
7. Pelaporan pengelolaan Dana Desa juga sudah baik. Dibuktikan dengan pertanggung jawaban Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan RAPBDes.
8. Keefektifan pengelolaan Dana Desa sudah bagus. Hal ini ditandai dengan seimbangny pendapatan pencairan Dana Desa dengan pengeluaran yang dilaksanakan.

SARAN

Beberapa saran yang dapat dikemukakan untuk penelitian lebih lanjut, antara lain:

1. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di pemerintah Desa Puri maka bisa diberikan pelatihan dalam hal teknologi informasi yang berkembang, agar selalu up to date dalam pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa yang ada di internet.
2. Diharapkan perangkat desa Puri bisa memperhatikan penggunaan teknologi informasi sedikit demi sedikit dengan melihat cara bekerja staf yang khusus bekerja di bidang teknologi informasi, sehingga jika

ada kesalahan dan staf tersebut tidak ada bisa membenarkan sendiri tanpa menunggu staf terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Syamsul (2012). *Leadership ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana media
- Azhar Kasim. 1989. *Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi*. Jakarta: PAU Ilmu-ilmu Sosial UI
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur. 2016. *Modul Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Sekretaris Desa*. Surabaya: Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Deti Kumalasari (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (skripsi)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.
- Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih (2017). *Implementasi Kebijakan Dana Desa (tesis)*. Universitas Jenderal Soedirman. Banyumas.
- Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim (2017). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang (skripsi)*. Universitas Islam Malang. Malang.
- Moloeng, L. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda

- Muhammad Basuruddin (2014). Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2012, (skripsi). Universitas Riau. Riau.
- Nasution. (2009). *Metode Research*. Bandung: Bumi Aksara
- Nogi, Hessel. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo
- Pudjo Sumedi. (2010). *Organisasi dan Kepemimpinan*. Jakarta: Uhamka Press
- Riskasari (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongli Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai (skripsi). Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Steers, Richard M. 1998. *Efektifitas Organisasi (terjemahan)*. Jakarta: PPM Erlangga.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2015. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*.

Widjaja, H. A. W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

SUMBER LAIN

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa